

Koreksi terhadap Pilihan Hidup: Kuasa Amal Bijak di balik Pengelolaan Taman Nasional di Kalimantan Barat

Dhimas Langgeng Gumelar

Mahasiswa Master Antropologi, Universitas Gadjah Mada
Email: dhimas.langgeng@mail.ugm.ac.id

Abstract

A successful participatory in conservation governance depends on the power relations between the government and the community. Governmentality or 'kepengaturan' has a significant force and effect on the processes and practices of a trusteeship. In the context of illegal logging, government intervention to target subjects possibly breaks the deforestation chain by carrying out the will and course of improving life. This research wants to answer why local business actors who can mobilize labor and network of illegal logging can turn into conservationists. This article focuses on examining subjects who become new targets of interventions and the effects of these interventions, as well as changes in position. In this study, "Power of Good Deeds" is an analytical unit and the medium in which power operates. The author argues that the power of good deeds is the most relevant mode of power for national park conservation objectives, especially in Indonesia. That is because the power promotes mutually beneficial, collective, social, and affective alliances. In this article, I generated sources from two-month fieldwork in February – March 2018 at Ketapang and North Kayong Regencies, West Kalimantan. This paper will review the history, strategies, and scenarios of trusteeship in national parks arrangement.

Keywords: *power of good deeds, the will to improve, trustees, national parks*

Abstrak

Keberhasilan tata kelola konservasi yang partisipatif bergantung pada relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. *Governmentality* atau 'kepengaturan' menjadi kekuatan yang berdampak pada proses dan praktik seorang wali masyarakat. Dalam konteks pembalakan liar (*illegal logging*), intervensi pemerintahan kepada subjek target dapat memutus rantai deforestasi dengan cara menjalankan kehendak serta amalan perbaikan hidup. Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mengapa aktor pebisnis lokal yang mampu memobilisasi tenaga kerja dan berjejaring dengan kelompok klien pembalakan liar dapat berubah menjadi konservasionis. Artikel ini fokus pada pemeriksaan subjek yang menjadi target baru intervensi dan efek dari intervensi tersebut, serta pergantian posisinya. "Amal bijak" menjadi unit analisis dalam kajian ini dan akan ditempatkan sebagai medium di mana kekuasaan beroperasi. Penulis

berargumen bahwa amal bijak merupakan mode kuasa paling relevan dengan tujuan-tujuan konservasi taman nasional di Indonesia karena mempromosikan aliansi yang bersifat saling menguntungkan, kolektif, sosial, dan afektif. Data-data dalam artikel ini bersumber dari penelitian selama dua bulan dari Februari–Maret 2018 di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tulisan ini akan mengulas sejarah, strategi, dan skenario wali masyarakat dalam bidang kepengaturan taman nasional.

Kata Kunci: *kuasa amal bijak, kehendak untuk memperbaiki, wali masyarakat, taman nasional*

Pendahuluan

Suatu hari di bulan Juni 2013, Harman sedang mengoperasikan mesin pemotongan kayu di wilayah kerjanya di Tanjung Gunung. Dalam bising mesin gergaji meja, satu pasukan Polhut (Polisi Hutan) lompat dari mobil bak terbuka, dan menyergap Harman dengan cekatan. Tidak ada perlawanan, Harman hanya pasrah. Puluhan kubik kayu diamankan sebagai barang bukti persidangan. Dia divonis selama enam bulan atas dakwaan pencurian dan penimbunan kayu-kayu ilegal dari Taman Nasional Gunung Palung (TNGP).

Selama lebih dari lima tahun Harman menjadi target operasi. Setiap ada informasi penangkapan, ia mengandalkan anak buah, saudara, teman, hingga polisi-polisi untuk merahasiakan persembunyiannya. Selama berkarir sebagai bos pembalak kayu (*tauke*), Harman mengandalkan jaring pengaman atau jaring pertukaran politik, ekonomi dan sosial seputar pembalakan liar di tingkat kabupaten. Mereka adalah oknum dari pihak kepolisian, Balai TNGP, preman lokal, pemilik *sawmill*, dan termasuk pejabat tinggi Kayong Utara. Penangkapan Harman oleh Polhut merupakan cara untuk memutus *lingkaran setan*, suatu jaringan penebangan liar yang bekerja untuk mencari rente di luar kerangka hukum, dan menggerakkan arus keuntungan secara bergilir (McCarthy 2000).

Dalam bahasa sehari-hari di kantor Balai TNGP, orang-orang seperti Harman disebut sebagai orang *pengkang* (keras kepala) atau orang *tempuras* (susah diurus). Mereka kebanyakan menjadi target operasi karena masih menjarah kayu-kayu taman nasional. Balai TNGP ingin membujuk para orang *pengkang* tersebut supaya mereka ikut mendukung program-program konservasi walaupun usaha ini belum sepenuhnya sukses. Hal ini berbeda dengan posisi Harman sekarang yang telah dipromosikan oleh Balai TNGP sebagai konservasionis. Balai TNGP menjadikan Harman sebagai pahlawan yang siap mengamalkan program-program konservasi taman nasional dan mencegah anggota masyarakat masuk ke dalam lingkaran setan.

Taman nasional adalah kawasan lindung yang memiliki fungsi konservasi. Pengaturan alam dan manusia di wilayah kawasan lindung menyuguhkan warisan pengetahuan kolonial tentang alam (Lowe 2006). Pergeseran pendekatan dalam mengatur

alam dan manusia melahirkan pendekatan partisipatif dengan praktik dan cara-cara neoliberalisme yang fokus pada penguatan mekanisme konsensual (Orlove dan Brush 1996; Brosius 2004; Igoe, Brockington, dan Duffy 2008; Blanchard dkk. 2017). Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami proses induksi dan transformasi menjadi komunitas konservasi (Dzingirai 2003; Tsing, Brosius, dan Zerner 2005) dan sebagian menjadi pengungsi konservasi tersingkir dari permukimannya sendiri (Dowie 2006; Brockington dan Igoe 2006).

Kasus-kasus dalam konservasi taman nasional menggambarkan masalah dan kebijakan tata kelola hutan, berada dalam hubungan-hubungan majemuk, kompleks, koersif, bersitegang, dan kolaboratif. Sejumlah literatur telah menunjukkan situasi-situasi politik pengaturan itu dengan mempelajari lagi formasi identitas baru dari interaksi perbedaan sistem ekonomi-politik, reproduksi sosial, penguatan agensi individu, praktik pemberdayaan wali masyarakat, serta hubungan-hubungan kapitalis di masa sekarang (Li 2000, 2007a, 2008; Cepek 2008, 2012; Wenk 2012). Oleh karenanya, intervensi kebijakan taman nasional adalah produk campuran kepentingan, sebuah intervensi dengan bahasa-bahasa moralitas untuk menjamin keadilan, moral, dan hak asasi (Mosse 2004; West, Igoe, dan Brockington 2006; Carrier dan West 2009).

Dari literatur di atas, artikel ini akan melanjutkan diskusi tentang politik pengaturan kawasan konservasi. Peneliti akan membahas mengenai perubahan posisi Harman sejak menjadi aktor dalam pembalakan liar, lalu berubah menjadi aktor dalam konservasi alam. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai, mengapa subjek seperti Harman, atau aktor pebisnis lokal yang mampu memobilisasi tenaga kerja dan berjejaring dengan pejabat kabupaten atau kelompok klien, dapat berubah menjadi konservasionis? Saya berupaya memproblematisasi relasi kekuasaan yang bekerja di balik proses perubahan tersebut. Penulis berargumen bahwa amal bijak merupakan mode kuasa paling relevan dengan tujuan-tujuan konservasi taman nasional di Indonesia karena mempromosikan aliansi yang bersifat saling menguntungkan, kolektif, sosial, dan afektif. Amal bijak adalah mode kuasa yang menciptakan kuasa nyata, dan itu tak lain akibat praktik tersituasi.

Governmentality dalam Pengelolaan Hutan

Kajian-kajian yang memahami hutan sebagai hutan politis telah berargumen bahwa mandat pengelolaan adalah kontrol terhadap kawasan, spesies, tenaga kerja serta ideologi dan pengejawantahan hegemoni kekuasaan (lihat Peluso 1992; Peluso dan Vandergeest 2001). Di sisi lain, analisis terhadap penelitian-penelitian antropologi terapan pada tema kawasan lindung sejak tahun 1970'an oleh West, Igoe, dan Brockington (2006) menegaskan *governmentality* atau 'kepengaturan' menjadi kekuatan yang berdampak pada bidang sosial, ekonomi, sains, dan politik. Beberapa antropolog menaruh fokus pada kekuasaan yang berlipat ganda, memproblematisasi relasi kekuasaan, dan menganalisis konservasi, pembangunan, program-efek kehutanan dengan paradigma kepengaturan (e.g. Agrawal 2005; West 2006; Li 2007a). Cepek (2011) mengkritik studi-studi itu sebagai studi klasik kepengaturan *a la* Foucauldian yang terlalu menekankan rasionalitas dan totalitas kontrol/pendisiplinan terhadap sebuah populasi dan justru melupakan esensi dari komitmen masyarakat lokal. Konservasionis dalam kajian Cepek meyakini bahwa mereka "must fight for the ecological integrity of their territory" (2012, 16). Cepek (2011)

mengkritik paradigma *governmentality* sebagai paradigma yang naif, tertutup, dan menihilkan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam konteks Indonesia mutakhir, program konservasi alam didominasi oleh sistem proyek yang sarat dengan pengesampingan masalah ekonomi politik atau kontrol terhadap prasarana penghidupan (lihat Li 2007a; 2015). Konsep *project* atau proyek menurut Li (2015, 79) adalah “a time-bound intervention” dengan tujuan dan anggaran tetap, dibingkai dalam matriks teknis demi hasil yang dikehendaki. Proyek ini mampu mereproduksi posisi subjek untuk mendukung dan bergantung pada upaya pemberdayaan. Dalam bahasa Welker (2012), subjek ini bergantung pada “paternalistic provider” dan memosisikan diri dalam label khusus dalam rangka membangun negosiasi konstan daripada total, tetap, atau final. Pola paternalistik ini sudah terbentuk dalam sistem kerja pembalakan liar dengan model yang diibaratkan sebagai lingkaran setan (lihat McCarthy 2000).

Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan cara analisis besutan Tania Li dari pendekatan Foucauldian mengenai *governmentality* (2007a, 2007b, 2007c). *Governmentality* beroperasi pada isu keamanan dan teritorial suatu negara dengan mencatat pengetahuan ekonomi politik, dengan mengejawantahkan rasionalisasi kekuasaan yang sama-sama dikehendaki. *Governmentality* ini secara ringkas punya definisi “conduct of conduct”, cara mengatur sesuatu yang benar (*the right manner of disposition of things*). Kehendak untuk mengatur atau untuk memperbaiki, dalam proses intervensi menghasilkan “desired outcomes and avert undesired ones” (Li 2007b, 264). Pertanyaan terkait mengapa subjek atau wali masyarakat (*trustees*) harus bekerja menjalankan kepengaturan sangat bergantung pada “the will to improve” atau kehendak untuk memperbaiki (Li 2007a). Posisi wali masyarakat amat penting di sini karena mereka memiliki objektif untuk tidak menciptakan relasi kekuasaan berbasis dominasi. Observasi terhadap posisi wali masyarakat ini sangat krusial, karena praktik-praktiknya tidak memicu benturan klaim yang mengarah pada resistensi. Li menyatakan hierarki perwalian dapat dan harus ditantang (2010, 234).

Amal Bijak dalam Kepengaturan Hutan

Saya menggunakan amal bijak sebagai unit analisis yang lebih spesifik saat meninjau persoalan *governmentality*. Menggunakan unit analisis amal bijak berarti membicarakan performa seseorang, perihal serba-serbi teknis. Di sini saya akan membahas cara terbaik yang dioperasikan dengan kehendak untuk memperbaiki perilaku pribadi sambil menyadari bahwa kuasa perbaikan itu berasal dari situasi yang Foucault konsepsikan sebagai *dispositif* (1980).

Rangkaian elemen-elemen heterogen mendefinisikan *dispositif*. Menurut Foucault elemen itu terdiri dari “discourses, institutions, architectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measures, scientific statements, philosophical, moral and philanthropic propositions” (1980, 194). *Dispositif* merupakan sistem relasi yang membuat semacam interaksi pergeseran posisi dan modifikasi fungsi di antara elemen-elemen heterogen. Foucault (ibid., 195) menegaskan bahwa fungsi utamanya, pada momen sejarah tertentu, yaitu menanggapi kebutuhan mendesak. Panagia (2019, 741) dalam tulisannya menegaskan *dispositif* Foucault sebagai perangkat untuk “*agencement/ assemblage and arrangement of things*” atau sebagai medium dari *governmentality*. Medium ini memungkinkan seorang

mengalami pergantian posisi menjadi subjek dengan identitas baru.

Amal bijak dalam tulisan ini mengacu pada medium di mana beroperasinya kekuasaan menghasilkan wawasan kritis, mengkritisi rasionalitas sistem proyek, dan berkehendak untuk terus memperbaiki populasi. Kuasa amal bijak lalu merupakan kapasitas yang *dispositif*. Kapasitas kuasa untuk mendistribusikan sesuatu dengan cara bukan dominasi dan koersi. Tetapi serangkaian tindakan singular dalam penyingkiran masalah dan penemuan solusi bersama. Kuasa amal bijak mendiagnosa juga menerjemahkan masalah dengan cara menguliti sebuah masalah, lalu meringkasnya jadi himpunan variabel, dan membenamkannya kepada sebatas rumusan dan anjuran teknis tertentu dari para wali masyarakat yang punya kapabilitas menghubungkan masalah dengan ketersediaan solusi. Li (2007a) mengistilahkan sebagai teknikalisasi permasalahan (*rendering technical*).¹

Program intervensi perbaikan hidup seringkali berupaya menyusun ulang formasi identitas dan kapital baru. Identitas yang tersematkan pada seorang konservasionis berasal dari praktik tersituasi (*situated practice*). Sosok subjek yang tampaknya “universal” perlu ditelusuri lebih lanjut. Subjek ini adalah produk dari artikulasi kelompok dan re-artikulasi dari sumber kepemilikannya sendiri yang menjadi pemikiran diskursif anyar dalam pengertian perbedaan, otonomi, dan hak kebudayaan (Escobar 2004; Li 2007a, 22; lihat Li 2000). Politik berperan dalam pergeseran posisi itu. Tania Li (2007a), contohnya, berargumen politik sebagai suatu ekspresi yang berfungsi menantang cara pengaturan yang terlalu teknis dan sangat rasional. Dalam studi *The Will to Improve*, diskusi utama pada gejala kepengaturan melahirkan terminologi “practice of politics”. Di sana dia berargumen bahwa “The practice of politics stands at the limit of the calculated attempt to direct conduct” (ibid. 12). Di sini, dalam konteks *governmentality*, praktik politik mencirikan suatu konjungtur spesifik. Li mendefinisikan konjungtur sebagai “the set of elements, processes, and relations that shaped people’s lives at this time and place, and the political challenges that arise from that location” (2014, 4).

Penelitian etnografi ini memperhatikan kekhasan konjungtur dalam proses dan praktik, serta pergeseran relasi kekuasaan di dalamnya. Sebagaimana telah Li (2007c) kemukakan, konjungtur membuat kekuasaan dapat dianalisis secara empiris. Konjungtur menghadirkan batasan intrinsik pada intervensi pemerintahan atau dalam proses kepengaturan. Dengan kata lain, kekhasan konjungtur telah menandai *efek* dari keterbatasan intervensi—kepengaturan dan kapasitas subjek untuk bertindak—sehingga mengejawantahkan kuasa amal bijak. Berdasarkan pemahaman ini, menjadi krusial untuk menempatkan amal bijak sebagai unit analisis. Amal bijak bekerja dengan cara melakukan penutupan atas masalah ekonomi politik yang menjadi prasarana penghidupan. Dengan cara ini, bentuk pengetahuan dan teknik tertentu dapat beroperasi mengikuti praktik-praktik kreatif subjek dan menentang legitimasi *regime* keproyekan. Kuasa amal bijak mengandalkan banyak kemungkinan dan pilihan dari tindakan subjek, termasuk kemungkinan adanya kritik atau hasutan.

Maksud tujuan akhir kuasa amal bijak kerap kali diabaikan oleh masyarakat. Meskipun demikian, Li (2007c) menyarankan supaya kita tidak terburu-buru

1 Kajian Ferguson mengenai aparatus “anti-politics machine” (1994; lihat Li 2007a) menunjukkan bagaimana problematisasi dan teknikalisasi permasalahan adalah praktik kunci ganda dalam pengaturan populasi.

mengasumsikan ketidaktahuan masyarakat sebagai imbas dari upaya depolitisasi. Kuasa amal bijak barangkali merupakan bahasa mediasi yang memiliki tujuan politis. Kebijakan maupun praktiknya yang politis ini seringkali tertutup dari intervensi luar karena referensi dan tatacara yang dilakukan mengikuti pola rancangan para wali masyarakat (lihat Li 2007a). Dengan analisis kuasa amal bijak ini, saya mencoba memperjelas maksud Li mengenai politik sebagai praktik konkrit: politik tidak berada di luar pemerintah, tetapi merupakan bagian darinya (2007c, 277).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2018, di dua tempat yang saling terhubung: di lingkungan kantor Balai TNGP, di Kabupaten Ketapang, dan di Dusun Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, Kabupaten Kayong Utara. Di lokasi pertama, partisipan penelitian berjumlah enam orang: satu perempuan dan lima laki-laki dengan rentang usia antara 28-50 tahun. Partisipan di lokasi kedua ditentukan secara acak, tetapi memprioritaskan subjek yang menjadi sasaran utama program. Terdapat enam orang yang keseluruhannya adalah laki-laki dengan usia antara 30-70 tahun. Dua bulan penelitian menghasilkan 22 wawancara, namun hanya ada beberapa situasi yang membuat peneliti punya hubungan saling percaya dengan partisipan sehingga diadakan wawancara mendalam.

Seringkali hasil wawancara kurang menunjukkan koherensi dengan praktik-praktik di lapangan, maka peneliti berusaha memisahkan data dari hasil wawancara dengan praktik-praktik yang bersengkabut (lihat Li 2007a). Sebagaimana diingatkan penulis lain (Li 2007c; Welker 2012) banyak praktik, proses, dan peristiwa berasal dari sebuah program. Beberapa aktor memperlihatkan kekuatan, pengetahuan, dan praktik yang berbeda dari program yang diikuti. Dengan demikian, penulis mendalami peran dua orang aktor, pertama adalah aktor pembalak liar di Tanjung Gunung bernama Harman, dan kedua adalah staf Polhut Balai TNGP bernama Denny. Mereka terlibat dalam program yang sama. Mempelajari dua aktor kunci adalah pilihan strategis secara etnografis untuk memahami *governmentality* berdasarkan: program yang diikuti, praktik yang dihasilkan, dan dampak dari intervensi itu (lihat Li 2007c).

Dengan menggali implementasi program di Tanjung Gunung, saya berusaha membaca intervensi yang memengaruhi posisionalitas Harman dalam konservasi taman nasional. Dengan berpartisipasi langsung pada kegiatan Balai TNGP di desa, saya mengobservasi hubungan aktual antara Denny dan staf Balai TNGP dan masyarakat kaitannya dengan pengamanan hutan, pengalaman masyarakat, dan pengetahuan mengenai hukum pemanfaatan hasil hutan. Fokus partisipasinya adalah melihat lebih dekat interaksi antar pribadi, isi, dan konteksnya serta bagaimana masing-masing membangun hubungan personal (lihat Leach dan Fairhead 2000). Dalam interaksi tersebut, peneliti memperhitungkan derajat posisi politik partisipan penelitian. Selain wawancara mendalam dan partisipasi observasi, penelitian ini juga menggunakan dokumen resmi Balai TNGP dan Japan International Cooperation (JICA). Dengan metode ini, saya berargumen mengenai pentingnya membahas proses penentuan subjek target intervensi program, dan efek intervensi yang dialami oleh subjek tersebut sehingga memengaruhi posisionalitasnya.

Sejarah Taman Nasional Gunung Palung (TNGP)

Frontier di pelupuk mata di seberang garis Dusun Tanjung Gunung dengan Gunung Palung itu pernah tampak sebagai sumber daya duniawi. Orang Bugis Wajo tinggal di sana, datang dalam gelombang waktu berbeda dengan sesama Bugis dari Pontianak.² Abad ke-19 dan ke-20, perantauan Bugis ke barat tak berhenti, bahkan antara kurun waktu 1915 dan 1930,³ orang Bugis di Pontianak sudah berkompetisi akibat mahalannya harga makanan dan rendahnya pengembalian keuntungan untuk produksi tanaman komersial (Lineton 1975, 177). Migrasi orang Bugis menurut Acciaioli (1989) adalah cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan politik supaya tidak di posisi subjek ter subordinasi, dan lebih ke dorongan untuk mencapai sifat-sifat progresif dalam kehidupan.

Nama Gunung Palung telah tercatat dalam peristiwa perseteruan batas teritorial kerajaan Matan, Simpang, dan Sukadana pada pertengahan abad ke-19 (lihat Barth 1895). Pelabuhan Sukadana ramai dengan ekspor produk hasil-hasil hutan di sepanjang tahun 1854-1855 (lihat Von Dewall 1862, 144-146). Ketika produk-produk hutan mengalami penurunan, orang Eropa dan Cina sebagai pedagang perantara menanamkan modal untuk pengembangan perkebunan kopra mentah yang mudah dipraktikkan petani kecil.⁴ Kebun kopra menjadi alasan ekspansi penguasaan lahan antara tahun 1910 hingga 1920, dengan mempekerjakan buruh untuk membentuk parit-parit di daerah *frontier* pesisir Kalimantan Barat (Lindblad 1994; Fernando dan Bulbeck 1992). Bentuk permukiman Tanjung Gunung membaaur dengan infrastruktur perkebunan kopra dengan model perumahan segaris dengan parit, membujur dari Sungai Rangkong ke arah kebun di lereng Gunung Palung.

Keberadaan populasi tersebut mengancam kelangsungan habitat hewan asli Gunung Palung. Argumen ini tertulis pada dokumen perencanaan awal Suaka Margasatwa Gunung Palung, ditulis oleh MacKinnon dan Warsito tahun 1982. Salah satu titik puncak di Gunung Palung bernama Panti adalah wilayah habitat asli orangutan (*pongo pygmaeus wurmbii*) dengan populasi lebih padat daripada daerah lain di Indonesia (Rijksen dan Meijaard 1999). Gunung Palung semula berstatus sebagai cagar alam pada

- 2 Kajian Ota (2010) menunjukkan orang Bugis adalah “Orang Laut”, atau “Orang Melayu” menurut masyarakat lokal, dalam pengertiannya sebagai migran yang tinggal di kantong-kantong komunitas kecil. Mereka masih berada dalam ruang lingkup politik pemerintahan namun amat tidak terintegrasi dengan baik. Sehingga setiap kelompok bebas untuk mengelola dan menciptakan permukiman yang layak huni. Mulai tahun 1835 pemerintah Belanda mengatur persoalan amalgamasi kelompok etnis. Dengan berlakunya *Staatsblad* 1866 No. 7, kelompok tersebut harus tinggal di kuartir wilayah tertentu dengan satu pemimpin sehingga mereka dapat diperlakukan berbeda (lihat Gie 1992).
- 3 Kajian Mansyur (2016) mengungkap jumlah orang Bugis di pesisir Kalimantan menurut sensus Departement van Landbouw pada tahun 1930 sebesar 95.048 dengan mayoritas orang Bugis Wajo dan Bone.
- 4 Kajian Lineton (1975) di Pontianak mengungkap kecenderungan migran Bugis berkompetisi dengan memperluas lahan ketika harga kopra sedang bagus, sehingga mereka tidak satu pun mempergunakan lahannya untuk padi kecuali dengan teknik kombinasi.

tahun 1937⁵ yang berfungsi melindungi orangutan.⁶ Statusnya berubah menjadi suaka margasatwa pada Desember 1981 dengan luas kawasan 60.000 ha.⁷ Keberadaan habitat asli orangutan menjadi penentu kepentingan pihak luar dalam mendukung pengamanan suaka margasatwa. Sebagai contoh adalah proyek ilmiah yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Nasional (LBN), Bogor tahun 1983 dan proyek Stasiun Penelitian Cabang Panti (SPCP), sebuah stasiun pengamatan orangutan yang mulai dibangun tahun 1984 oleh Mark Leighton dari Peabody Museum of Harvard University (Amerika). Rekonstruksi batas peta taman nasional secara bertahap dilakukan terus menerus,⁸ dan peta petunjuk teknis tahun 1983/1984 menjadi bahan untuk peresmian TNGP pada tahun 1990 dengan luas 90.000 ha.⁹

Balai TNGP berwenang mengatur hutan konsesi serta kantong-kantong populasi yang tidak atau masuk dalam zonasi. Dengan sistem zonasi, taman nasional dibentuk untuk kegiatan terbatas dan khusus. Zonasi terdiri dari zona inti, rimba, pemanfaatan penelitian dan pariwisata, tradisional, rehabilitasi, dan khusus. Zona khusus menjadi suatu peluang negosiasi dan pendekatan pihak taman nasional ke masyarakat (Moeliono dkk. 2010). Di TNGP, terdapat tiga jenis zona khusus: fasilitas umum, permukiman, dan perladangan dengan total 8843,39 ha dari total luas 90.000 ha atau 9,82% (Statistik Balai TNGP, 2017). Berdasarkan kriteria Permenhut No. 56/2006 pemukiman dan perladang tidak bisa mengakses kantong-kantong lahan yang berada di dalam kawasan. Eksplorasi perladangan dan perambahan hutan yang spontan dianggap sumber penyebab deforestasi oleh rezim konservasi alam. Nilai-nilai intrinsik hutan ada dan hilang tergantung pada definisi dan makna laju deforestasi (Fairhead dan Leach 1996).

Bugis Wajo⁶ Tanjung Gunung pun berada dalam kerangka, secara *de facto* kurang memenuhi manajemen dan hak penguasaan legal sumber daya agraria, meski selama hampir satu abad terjadi proses privatisasi tanaman keras. Masalah penting sumber daya *frontier* yang terbuka dan milik bersama, menurut pandangan legal deforestasi tidak sah, mentah, kasar, dan boros. Masa ketika harga karet buruk, distraksi pasar gaharu, dan krisis ekonomi 1997-1998 telah membuka perekonomian baru sumber daya *frontier*. Efek dari gambling perekonomian itu, di *frontier* TNGP, menciptakan perampasan tanah yang minim, akan tetapi masyarakat berhadapan dengan kompleksitas mekanisme pengaturan.

5 Sesuai dengan Buku Statuta No. 4/13.ZB/1937.

6 Kajian Boomgaard (1999) menunjukkan bahwa orangutan termasuk dalam kelompok 'hewan populer', yakni kategori hewan yang terancam punah berdasarkan hukum Perlindungan Satwa Liar dan Ordonansi Permainan, Buku Statuta No. 234 tahun 1924, termasuk tujuh spesies mamalia serta 53 kelompok burung lainnya.

7 Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 1014/Kpts/UM/12/1981.

8 Hingga tahun 2014, penetapan luasan baru TNGP sebesar 108.043,90 ha mengacu pada SK.4191/Menhut-VII/KUH/2014. Kemudian, berdasarkan Perda No.10 tahun 2014 tentang RTRWP Kalimantan Barat, TNGP meliputi wilayah Kabupaten Kayong Utara (80%) dan Kabupaten Ketapang (20%). Meski SK sudah berlaku, namun kejelasan batas TNGP masih bermasalah sampai berlangsungnya penelitian ini.

9 Surat Pernyataan Menhut Nomor: 448/Menhut-VI/1990.

Kerja Harman dalam Jaringan Pembalakan Liar

Orang-orang *frontier* adalah seorang *wild men* (Tsing 2003). Subordinasi politik dalam reproduksi sosial menempatkan orang Wajo Tanjung Gunung ke dalam lingkup wacana perbedaan sosial. Ada konstelasi pemosisian antara identitas itu digenderkan (*gendered*) dengan kondisi keterpinggiran (*marginality*) sebagai sumber ketidakleluasaan dan kreativitas (Tsing 1993). Orang-orang Tanjung Gunung, secara berulang, terus mengalami titik peralihan penting akses terhadap sumber daya *frontier*—sumber daya hutan, tanaman keras, perkayuan dst.—karena dirinya sebagai *wild men*, menggantungkan kehidupan di dalam dan di luar negara yang malar terkontaminasi (Tsing 1993; 2012). Dinamika manusia *frontier* dan sumber dayanya biarpun begitu “can unseat the obedience of custom to create a wider, wilder citizenship. Drawing men from everywhere, frontier culture can mobilise them both for and against each other” (Tsing 2003, 5105).

Nantinya Harman dan para pembalak Tanjung Gunung memperkenalkan kepada saya konjungtur disjungtif itu: sebagai pembalak tetapi juga sebagai konservasionis. Karakter itu tidak negatif, justru ia memiliki sesuatu yang melimpah ruah. Harman menekuni kerja di hutan sejak tahun 1980-an ketika warga Tanjung Gunung memulai perburuan resin gaharu. Harman memilih ikut Wak Carni untuk memburu gaharu ketimbang melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP. Setiap bulan, perburuan rutin gaharu secara sporadis di kapiler Gunung Palung menempatkan Harman pada radar akses sumber daya *frontier*, dan dengan sifat sporadis yang liar itu, menciptakan permulaan bagus untuk kekayaan. Umumnya, pemburu di Tanjung Gunung seperti Harman memanen resin dengan kualitas rendah namun intens dan banyak. Faktor ekologi gaharu menciptakan sistem kerja tak menentu, menghabiskan waktu berminggu-minggu di Gunung Palung, dan Harman menyukai perilaku kerjanya di mana segala sesuatunya melimpah. Pemanenan gaharu di sekitar Gunung Palung adalah contoh ekstrim siklus *boom* dan *bust* yang mengarah ke overeksploitasi (Salafsky, Dugerlby, dan Terborgh 1993).

Sewaktu Kalimantan baru memulai mekanisasi alat produksi usaha kayu (ca. 1971), pemerintah Orde Baru segera menggelar konsolidasi (1978-79) untuk mengamankan 16 juta m³ areal hutan atau 2/3 dari keseluruhan konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di Indonesia (Potter 2005, 379). Setelah diperkenalkan sistem HPH sekitar tahun 1975 di Ketapang, penduduk mulai tertarik mempelajari keahlian sebagai penebang kayu. Hingga tahun 1990 sejumlah 24 HPH resmi terdaftar namun hanya 6 HPH dengan total area 813,000 ha yang aktif beroperasi (Soetarto, Sitorus, dan Napiri, 2001, 21). Sementara di tahun 1991, di wilayah barat laut TNGP, beroperasi satu HPH saja yang mempekerjakan masyarakat setempat (Hiller dkk. 2004, 197). Ekstraksi kayu tetap berlangsung meski dengan cara-cara ilegal. Dari survei 11 desa penyangga di kawasan TNGP, Hiller dkk. (2004) mendapat garis besar bahwa pembalakan liar sudah menjadi bagian integral masyarakat selama satu dekade silam.

Efisiensi kerja meningkat karena sistem stimulus keuangan yang disuntik oleh pebisnis (dikenal sebagai *cukong*) kepada *tauke* atau bos yang mengontrol kelompok *penggesek* ‘buruh penebangan kayu’. Kelompok buruh ini menjadi klien dari *tauke*. Pada dasarnya *tauke* adalah individu atau agen yang menerima modal dari *cukong* dan merekayasa sistem produksi kayu liar. Sistem *tauke* adalah mekanisme pemberian kredit guna membayar kebutuhan operasional penggesek setiap ekspedisi. Sebagai bos, Harman

mengatakan, “kalau kerja kayu dulu, cepat itu tauke percaya dengan kita [*penggesek*]. Kayu itu belum digoyang, paling masih digoyang angin, kita udah bisa memiliki uang”. Para bos memanfaatkan betul modal untuk pembangunan jalan keluar kayu yang menghubungkan titik pembalakan, dengan sungai atau parit, sampai ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

Sejak tahun 1996, tekanan pasar kayu ilegal semakin kuat karena minimnya kapasitas produksi HPH di Ketapang. Setelah krisis 1997-1998, gairah berubah menjadi candu, meningkatkan finansial warga sekitar TNGP dan mengubah kreditur menjadi pemodal independen yang bisa mengatur peralatan dan biaya ekspedisi secara mandiri. Desentralisasi memperkuat kanal-kanal permainan politik kehutanan (Soetarto, Sitorus, dan Napiri 2001; Hidayat 2016). Hal ini juga melanggengkan sistem klientelisme yang mendorong para pembalak mencari koneksi informal (McCarthy 2002a) dan menunjukkan kompleksitas dari sistem ekonomi politik Indonesia saat itu (Casson dan Obidzinski 2002). Desentralisasi dengan demikian sekaligus menata konstruksi *frontier* yang semakin kaya (de Jong, Knippenberg, dan Bakker 2017).

Sistem *tauke* menggambarkan jaringan transetnis dan kolaborasi translokal untuk mobilisasi tenaga kerja di *frontier*. Harman merasakan dirinya lebih otonom karena sanggup memberi kesempatan kerja kepada puluhan anak buahnya. Penggesek-penggesek itu merupakan buruh yang diperoleh Harman dari berbagai kalangan etnis (e.g. Bugis, Madura, Sambas). Yang penting mereka mau kerja keras dan bertanggung jawab. Dalam satu kali ekspedisi, Harman dapat mengekstrak kira-kira sekitar 400-500 m³ dengan waktu pengerjaan antara 3-4 minggu dan jumlah pekerja 30-50 orang. Jumlah pekerja itu diklaim Harman paling besar di antara bos lain di Sukadana.¹⁰ Perilaku oportunistik dan kapitalis Harman, dalam konteks tanggung jawab sebagai bos penggesek memang mencontohkan struktur berpikir pinggiran.¹¹ Cara berpikir pinggiran mengisahkan perjuangan kelompok masyarakat mencari keberuntungan dari sumber daya *frontier*. Nasibnya sangat bergantung pada pemikiran bahwa selalu ada jalan untuk dirintis, ada cara untuk dilakoni. Penutupan akses hanyalah peristiwa yang konsekuensial, dan hanya butuh kerja keras untuk menata ulang nasib baiknya kembali. Dalam kajian *Land's End*, Tania Li telah berargumen bahwa kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya *frontier*, mencerminkan struktur perasaan yang nyata. Perasaan tanggung jawab, peduli, dan kerja keras individu akan membuahkan sukses karena “[...] they situated themselves on a timeline moving forward in which their turn would eventually come” (Li 2014, 154).

Bersikeras bahwa kemakmuran hidup terletak pada usaha pembalakan liar adalah tekad Harman. Sistem tauke dan jaringan kerja mempertahankan pandangan tentang struktur perasaan individu bahwa para *cukong* akan menjanjikan lebih banyak modal

10 Jumlah pekerja ini bisa melampaui hasil penelitian yang dilakukan Harvard Laboratory of Tropical Forest Ecology (LTFE) dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan pada tahun 1998. Berdasarkan wawancara dua KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) Kabupaten Ketapang, Soetarto, Sitorus, dan Napiri (2001) melaporkan hasil rata-rata perolehan setiap tauke dengan jumlah kayu 1000 m³/bulan memerlukan jumlah penebang berjumlah 4-8 atau 10-20 paling banyak. Penelitian tersebut memang memprediksi bahwa jumlah ekstraksi kayu akan meningkat pada dekade berikutnya.

11 Untuk diskusi tentang struktur berpikir pinggiran atau “frontier thinking” lihat tulisan Li (2014, 153-155).

lagi dan para *tauke* seperti Harman akan menawarkan prospek kekayaan yang realistis bagi buruh *penggesek*. Harman dulunya menganggap kemiskinan adalah dorongan untuk mengubah kehidupannya. Sistem *tauke* menjadi alasan yang masuk akal untuk menata orientasi perubahan hidupnya, termasuk kehidupan keluarga dan buruh *penggesek*, dari nol menuju ke tangga kemakmuran:

“Namanya juga usaha untuk menghidupi keluarga, bertanggung jawab. ... Bukan hanya aku saja cari makan, buat 300 orang yang mengharap. Kerja kayu ini sakit, seperti pencuri tidak peduli siang malam, saling mengintai.” (Wawancara dengan Harman, 19 Maret 2018)

Penting untuk dimengerti, dari banyak orang Bugis Tanjung Gunung yang harus bertahan dengan kehidupan setelah krisis ekonomi, yang mayoritas menggantungkan kehidupannya sebagai penggesek, menjadi kian sulit dengan menguatnya subordinasi politik, ketimpangan akses, dan privatisasi dan kolusi antara bos penggesek dengan pejabat desa maupun pejabat daerah.¹² Oleh sebab itu seperti telah Li tekankan, cara berpikir pinggiran tersebut merupakan janji kepada diri sendiri “to be a whole person” (2014, 179) dan cara berpikir pinggiran itu bukan untuk semua orang.

Konstelasi posisionalitas Harman bagian dari koneksi transetnis yang bersifat jahat, rakus, dan tidak legal itu adalah rupa dari perekonomian sumber daya *frontier*. Sistem perekonomian *frontier* dapat dilawankan dengan perekonomian berbasis klaim legal (anti-*frontier*). Sebab di *frontier*, “the only promise that must surely be kept is of fabulous, unearned wealth” (Tsing 2003, 5104). Dalam etnografinya, Tsing (1993) menyadur pertemuan masyarakat Dayak Meratus dengan modernitas kapitalisme ke logika disjungsi. Orang Meratus berada dalam kelatengan kontaminasi dan tegangan masalah politik dan ekologi tetapi berada dalam jangkauan pengaturan pemerintah; disjungsi tersebut adalah integritas budaya yang menyediakan basis kekerabatan kosmopolitan bagi praktik penghidupan di *frontier*. Kategori *frontier* bukan berasal dari masyarakat adat atau ilmiah; dengan demikian perubahan kehidupan yang berlangsung di *frontier*, seperti teka-teki, membutuhkan penjelasan (Tsing 2003; Li 2014).

Pendekatan *Bottom Up Denny*

Perekonomian *frontier* yang legal dan sah berwujud ekonomi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Proyek pemanfaatan HHBK mencontohkan kesuksesan Balai TNGP satu dekade terakhir. Hal ini berkat penyesuaian struktural organisasi Balai TNGP dengan pelatihan teknis dari JICA dalam program IJ-REDD+.¹³ Penyesuaian struktural tersebut menciptakan pendekatan kebijakan campuran untuk mengatasi berbagai persoalan gangguan ekosistem TNGP (Kubo, Wibawanto, dan Rossanda 2019). Kebijakan campuran menawarkan metode pendekatan khusus, lain dari pendekatan pengamanan hutan atau pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Dari tahun 1999-2009,

12 Lihat koran Tempo (2008) “Asyiknya Menjarah Rame-Rame”.

13 Indonesia-Jepang Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (IJ-REDD+) membangun kontrak awal untuk tahun 2013-2016 dengan 10 desain kegiatan yang masing-masing mewakili fitur-fitur pada pemodelannya.

pendekatan PRA ditonjolkan dalam program pemberdayaan komunitas binaan dan kader konservasi.¹⁴ Namun pendekatan PRA menerapkan sistem keproyekan, sehingga setiap program baik itu “penyerahan,” “pelatihan,” “pembinaan kader,” “pembekalan teknis,” serta “penyuluhan” berlaku sebagai intervensi tunggal.

Pendekatan pengamanan hutan dan PRA dinilai JICA kurang demokratis. JICA mencontohkan bagaimana konservasi alam berjalan secara bilateral. JICA memperkenalkan tiruan model Community Based Natural Resource Management (CBNRM) dengan proyek pilotnya di Kalimantan Barat.¹⁵ Identifikasi rampung dilaksanakan pada tahun 2014 dengan penentuan enam desa model, dan salah satu desa ditunjuk sebagai lokasi *pilot project*.¹⁶ Para staf Balai TNGP kemudian mengenalnya sebagai pendekatan *bottom-up*. Kepala proyek IJ-REDD+, Dicko Rossanda menegaskan bahwa *ouput* pelatihan menciptakan kesadaran objektif staf Balai TNGP untuk berbicara terapan dan perencanaan di lapangan, bukan hanya tindakan pengamanan.¹⁷

Para ahli-ahli Jepang melatih staf Balai TNGP sebagai petugas tingkat tapak yang harus memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Dengan skema kontinu, para peserta harus menyelesaikan empat fase pelatihan dari September 2013-Maret 2014. Pelatihan ini melibatkan belasan peserta yang terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Tenaga Pengaman Hutan Lainnya (TPHL), Polhut, Penyuluh, dan Kepala Resort. Kepala Balai TNGP berharap pelatihan itu dapat meningkatkan teknik komunikasi serta kapasitas petugas dalam memahami masyarakat. Peningkatan kapasitas itu sekaligus

14 Pada saat penelitian berlangsung, Balai TNGP mengelola rutin mitra komunitas binaan di desa-desa penyangga dan forum multipihak. Forum multipihak terdiri dari Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Masyarakat Peduli Api (MPA) kolaborasi dengan NGO Alam Sehat Lestari (ASRI), dan Sahabat Gunung Palung (Sagupa). Sagupa adalah forum media komunikasi multipihak yang terbentuk setelah *Lokakarya Penyiapan Pengembangan Aktivitas IJ-REDD+* di TNGP 22-24 September 2014 di Ketapang. Sagupa terdiri dari 20 instansi pemerintah, 13 kalangan usaha, 8 NGO, ditambah Pemerintah Kecamatan dan Desa di sekitar kawasan. Forum melaksanakan kegiatan konservasi di sekitar taman nasional, pelatihan dan pengembangan diri, dan diskusi dengan topik peranan dan fungsi antar pihak.

15 Lihat kajian mengenai CBNRM dari Tsing, Brosius, dan Zerner (2005).

16 Enam desa terdiri dari: Desa Sejahtera, Desa Sedahan Jaya, Desa Sempurna, Desa Pangkalan Teluk, Desa Riam Berasap, dan Desa Laman Satong. Penelitian Yoshikura (2017) menganalisis corak populasi di enam desa menggunakan *remote sensing data* dengan variabel deforestasi lahan tahun 2000-2013. Hasil analisisnya menyarankan Desa Sejahtera sebagai lokasi strategis untuk pilot program IJ-REDD+. Ada tiga premis: pertama tidak adanya perkebunan sawit; kedua, perladangan liar sebagai mata pencaharian utama paling rendah, dan penduduk hanya memperoleh hak tenurial di kebun hutan yang ditanami durian dan karet; ketiga, satu-satunya penyebab konflik adalah pembalakan liar. Dari analisis Yoshikura, penguasaan kebun hutan tak berpengaruh pada disparitas pendapatan yang disebabkan oleh peralihan sektor pekerjaan yang lebih modern. Data diperinci lagi bahwa pendapatan di perkebunan karet lebih besar ketimbang di sektor pertanian padi. Yoshikura mengkategorikan Desa Sejahtera di angka rendah aktivitas kelembagaan dan pemahaman aturan adat; di angka paling rendah intensitas dan aktivitas tenurial; di tingkat kecil praktik pemanfaatan HHBK; di paling rentan dari pemulihan kebakaran yang melanda rawa gambut (di tahun 2004 dan 2013); di kondisi minus perolehan manfaat positif adanya taman nasional.

17 Lihat Endi (2015) “Repressive approach “ineffective” in conservation efforts: Official”.

memperkenalkan pendekatan *Arumono Sagashi*.¹⁸ Kapasitas itu bertujuan “untuk perubahan tingkah laku mereka melalui pembangunan pertemanan dengan masyarakat dan analisis isu berbasis masyarakat secara tepat” (JICA 2014, 1). Masyarakat harus dibedakan dengan konsep non-masyarakat atau orang luar.

Pelatihan merupakan inti penataan ulang cara-cara lama ke tatanan baru atau saya sebut sebagai proses rekognisi.¹⁹ Proses rekognisi bertujuan mempelajari esensi pendekatan *Arumono Sagashi* yakni fokus menemukan isu bersama dan menggali potensi dengan mengalihkan hukum eksklusif dengan memberinya modal sosial baru yaitu hubungan pertemanan di antara keduanya. Oleh sebab itu, fasilitator alias wali masyarakat tak bisa lain kecuali berbuat sesuai kehendak masyarakat. Proses rekognisi memberi jalan kepada staf balai untuk menerapkan pemerintahan lewat komunitas (lihat Li 2007a).

Kebaruan praktik konservasi TNGP diungkap manajer program NGO Yayasan Palung, di Ketapang dengan kalimat “Denny yang lahir dari pendekatan JICA.” Denny adalah seorang Polhut. Pada saat pelatihan, dia seorang diri menegaskan pentingnya pertemanan dan kunjungan *door-to-door* dalam menjaring informasi dan aspirasi daripada menegaskan aturan pengamanan Polhut. Hal ini terkemuka dalam dua pernyataan Denny di bawah ini:

“Prinsip orang konservasi itu menyelamatkan pohon yang tegak, bukan yang tumbang. Ini kan konsep salah, mendatangi pohon yang tumbang terus di bakar, pergi pakai anggaran negara, sampai di hutan barang negara pun dimusnahkan. Kan dua kali rugi negara. Apa untungnya negara? Tak ada kan.” (Wawancara dengan Denny, 18 Februari 2018)

“*Basic* pengalaman saya di Polhut. Tangkap, hancurkan, musnahkan. Makanya saya ada jenuhnya di sana. Dengan kegiatan JICA itu, awalnya memang berat Polhut dijadikan sebagai fasilitator. Dari kerjaan nangkap-nangkap jadi mengandalkan negosiasi. Makanya saya waktu pertama terjun itu merubah pola pikir, *image*, jangan sampai membawa soal proyek, atau pengamanan *lah*. Jadi lepaskan semua itu, siap jadi fasilitator untuk memberdayakan masyarakat.” (Wawancara dengan Denny, 5 Maret 2018)

Denny menganggap desa atau dusun adalah tempat ideal belajar mendengar dan menyimak masalah seputar taman nasional. Ia memperlihatkan langsung kepada saya, cara-cara berkomunikasi dengan masyarakat persis saat saya bersamanya mendampingi komunitas binaan desa. Dan semua aspek komunikasi dibangun Denny melalui kerja-

18 Pendekatan ini mencakup: (1) menggali keterampilan fasilitasi di lapangan lewat kajian pengalaman berinteraksi antara petugas dengan penduduk, (2) menyatakan dirinya sebagai *outsider* ‘pihak luar’ dan mendiskusikan peranannya dalam pemberdayaan, (3) merancang konsep masyarakat sebagai dasar pelaksanaan program, (4) memahami metode-metode dasar seperti *Partnership Building*, *Fact Based Dialogue*, *Community Issue Based-Analysis*.

19 Lihat Gumelar (2020) dalam skripsinya penulis menjabarkan proses pelatihan jilid pertama selama empat fase yang dilaksanakan pada bulan September, Januari, Februari dan Maret. Ada catatan segmen berisi diskusi, debat dan penyangkalan, presentasi, dan evaluasi bersama fasilitator dari i-i-net, NGO Jepang yang punya keahlian di bidang manajemen sumber daya properti dan tata kelola masyarakat.

kerja sambungan demi menjaga hubungan sosial biarpun kondisinya terbatas.

Rasa solidaritas dan nostalgia di desa atau dusun, pengorganisasian yang terus berada di roda ekonomi HHBK, menempatkan kampung sebagai infrastruktur afektif (lihat Newberry 2018). Anggapan kampung dengan sumber daya potensialnya adalah momen kritis rangkaian dilema yang ingin diadvokasi dengan kerja-kerja fatis²⁰ untuk mempertahankan saluran komunikasi sembari menyampaikan tujuan program tanpa kehilangan fungsi sosialnya.

“Denny itu culun,” ingat Harman terhadap karakter Denny saat implementasi program awal pada bulan Mei - September 2014 di Tanjung Gunung. Harman memang mengharamkan berbagai bentuk atensi yang memungkinkan Denny mendekat. Denny sering menerima penolakan. Semua kegiatannya masih bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi untuk membangun ikatan sosial. Di sebuah buku yang disimpan dalam tas selempang kulit sintetis hitam, Denny menuliskan semua informasi dari jawaban pertanyaan di mana, dengan siapa, melakukan apa, dan berbicara apa. Kunjungan ke setiap daftar nama membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian.

Fasilitasi pertama salah mengenali polarisasi antara kelompok Islam Jamaah Tabligh dan Islam Bugis. Perbedaan aliran itu bagi Denny tidak punya kandungan potensi ekonomi. Problematisasi dengan *Arumono Saghasi* pada tahap awal fasilitasi belum menghasilkan isu meski kategori populasinya sudah berlabel ‘terbelakang’ secara ekonomi.

Sebelum periode fasilitasi pertama selesai, kontestasi atas implementasi *Arumono Saghasi* tak terhindarkan di internal balai. Sejumlah staf balai berseberangan dengan cara kerja Denny. Kebanyakan dari mereka masih mengunggulkan implementasi program dengan pendekatan PRA dan aturan pengamanan. Denny menyebut staf itu sebagai penganut “doktrin lama”, “keproyekan” atau mengelompokannya sebagai staf “kurang produktif.” Siapapun yang bekerja hanya mengacu pada target dalam matriks proyek, Denny mengelompokkan mereka ke dalam kategori kelas pasif. Karena itu, dalam kritiknya paling keras, dia menilai rekan-rekannya “tidak pernah mengubah pola pikir”, dalam arti mereka tidak ingin keluar dari sistem *top-down*, sistem keproyekan, sistem kejar pangkat dan insentif birokrasi. Komunikasi dengan masyarakat berjalan searah tanpa fungsi sosial atau membedah isu. Kendati fasilitasi merupakan teknikalisis permasalahan, keluwesan individu dalam membangun jawaban atas permasalahan konkrit dunia diperlukan juga.

Denny kerap memprovokasi dengan prinsip-prinsip ajaran JICA, meski terus gagal untuk sampai mengubah pola pikir staf yang lain. Staf junior kurang nyaman mengadopsi pendekatan itu karena tidak praktis. Mereka menggunakan doktrin dari staf senior yang masih terhubung dengan sistem keproyekan. Mereka kurang menyadari itu. Mereka tahu ada gap tetapi terlalu patuh pada birokrasi. Sejarah panjang penugasan telah mengkristalkan amalan keproyekan individu. Kontras doktrin itu dengan teknik ajaran JICA, ada pada level problematisasi. Maka Denny berani menyempal dari apparatus (represif) negara, ‘terlahir’ lewat rahim JICA lalu berkukuh dengan kerja-kerja fatis yang ia temukan sendiri. Denny menciptakan teknik mendengar secara komprehensif. JICA melabeli itu sebagai Facilitative Listening in Conservation (FALCON). Pendekatan tersebut melengkapi *Arumono Saghasi*, dan mulai dijadikan bahan ajar pada proses rekognisi jilid kedua, Agustus 2014 - Juni 2015.

20 Lihat konsep “kerja-kerja fatis” (*phatic labour*) dan infrastruktur yang dikaji Elyachar (2010).

“Ciri-cirinya FALCON, seorang fasilitator yang mendengar dan menyimak, sebagai kawan ngobrol, cari solusi. Jadi fasilitator itu kita harus siap dengan segala kemungkinan-kemungkinan, kita siapkan pola pikir itu. Baru kita bisa mengubah pola pikir orang lain, kalau kita ndak berubah pola pikir bagaimana mau bantu yang lain?” (Wawancara dengan Denny, 6 Maret 2018)

Maksud intrinsik Denny sebagai wali masyarakat dari Balai TNGP adalah harus menghormati integritas budaya maupun otonomi tubuh sosial. Seperti telah disinggung di atas, dalam arena *frontier*, disjungsi menyediakan basis kekerabatan kosmopolitan yang produktif. Seorang wali masyarakat harus terlibat dalam pekerjaan praktis sarat emosi untuk menegosiasikan kehadirannya (Mosse 2008, 122). Ada klaim saat Denny harus menggunakan reflektivitas dan kalkulasi risiko (lihat Tabel 1), yang kemudian mentransgresi metode-metode dasar untuk mengenali solusi atas perselisihan dua aliran Islam di Tanjung Gunung. Kekerabatan kosmopolitan dan pendekatan konsensual telah jadi medium Denny. Akhirnya, kelompok kesenian rebana bisa dijustifikasi sebagai prolog program pemberdayaan karena menjanjikan tambahan penghasilan dari kegiatan hiburan/wisatawan. Program ini berjalan tanpa harus menyelesaikan masalah perselisihan di antara dua aliran.

Tabel 1. Poin-Poin Pembelajaran Denny selama Bekerja dengan Masyarakat di Tanjung Gunung.

No	Pembelajaran yang Denny Peroleh di Tanjung Gunung
1	Pendampingan masyarakat perlu proses/ tidak instan
2	Posisi pendamping adalah menjadi pendengar keluh kesah masyarakat
3	Posisi pendamping dan masyarakat setara
4	Proses pendampingan tidak bersifat keproyekan
5	Pendampingan bersifat berkelanjutan
6	Dalam proses pendampingan posisi pendamping harus berada di tengah-tengah masyarakat
7	Dukungan yang dari pimpinan sangat diperlukan

Sumber: Arsip Balai TNGP.

Disjungsi budaya dan negosiasi yang sedang berlangsung memberi ruang untuk intervensi karena di sana terdapat tumpuan kritis untuk praktik-praktik yang fleksibel dan kreatif. Penampakan tumpuan pengaturan dan kemungkinan untuk berganti posisi ke teknikalisis permasalahan erat kaitannya dengan tindakan pengabaian atas hambatan pertanyaan ekonomi-politik yang tidak selesai yang masih jadi bagian wacana wali masyarakat (Li 2007a). Ada tegangan rasionalitas program-program IJ-REDD+ dan kritik terhadap fasilitasi pertama. Peralihan tumpuan mendorong praktik pemerintahan jadi terlalu rasional bagi Denny. Metode-metode dasar hanyalah pegangan, tuas yang berfungsi menjalankan *Arumono Saghasi* lalu FALCON. Namun pokok tumpuan Denny bersumbu dari rasa kekhawatiran terhadap suatu sentimen, lalu sikap terbuka kedua kelompok Islam, sehingga itu dimaknainya sebagai suatu kategori “*potentia*” atau substansi afektif untuk praktik-praktik perbaikan di Tanjung Gunung.²¹ Wali seperti Denny kebanyakan

21 Lihat kajian Lash (2007; lihat juga Elyachar, 2010). mengenai konsep kategori *potentia* sebagai

mengalami perjuangannya sendiri.

Dalam rangka memenuhi keluaran IJ-REDD+, Denny segera bermanuver untuk bertemu dengan Harman. Kedua pihak mengkonfirmasi awal mula pertemanan yang alot. Harman memosisikan diri mempertahankan argumen rasa kecewanya karena setiap Balai TNGP datang, meski ada komunikasi namun semua kembali ke simpang siur mendasar soal distribusi kekayaan. “Kau bergaji, sebulan pasti ada yang bisa kau ambil, kalau seperti saya, di mana saya minta?” sindir Harman kepada staf Balai TNGP. Menurut Denny, anggapan tidak makan kalau tidak bekerja kayu, adalah pola pikir yang salah. “Kalau dilihat kan sumber daya banyak, mereka ndak tahu, ndak sadar aja.” Pada kasus ini, terobosan Denny ke kelompok kesenian rebana cukup menarik simpati. Meskipun Denny terus bolak-balik berkunjung tanpa tujuan tunggal kecuali untuk mendengarkan cerita warga di rumah, percakapan di warung, cerita di sawah, maupun tausiyah di masjid. Sebagian besar waktu Denny dihabiskan untuk bersosialisasi.²² Begitulah sifat kerja fatis.²³

Pukul dua belas malam, Harman menelpon Denny untuk menyelesaikan masalah operasional kelompok. Padahal jarak tempuh dari rumah Denny ke Tanjung Gunung adalah 69 km atau 2 jam perjalanan dengan motor. Seperti biasa, aktivitas rutin Denny bertemu warga adalah malam hari dan pada hari Sabtu dan Minggu. Sedikit alasan, tuturnya siap di setiap waktu melayani keperluan masyarakat. Denny mengalokasikan kesediaan tersebut sesuai kebutuhan, karena dia harus menilai potensi dan menjalankan komunikasi terus menerus. Penting untuk diingat, potensi adalah isu tersembunyi sehingga orang luar harus membantu menemukannya. Pada fasilitasi kedua Oktober 2014, Denny berkomitmen memperkuat mekanisme pertemanan. Denny tidak memberikan janji berupa alternatif pekerjaan yang lebih menguntungkan daripada penebangan kayu. Denny menyalurkan pilihan-pilihan bantuan suportif yang Balai TNGP bisa lakukan kepada Harman agar kelompok menggerakkan kegiatannya secara mandiri atau swadaya.

Sehingga pada pertengahan 2015, Harman sudah berhasil menginisiasi sejumlah kelompok swadaya di Tanjung Gunung. Terdapat sebelas di bidang pertanian organik, dan budi daya tanaman keras (jabon merah dan jabon putih), pembibitan itik, dan nelayan. Kelompok sukarela yang potensial untuk dipromosikan adalah kelompok kesenian rebana. Dari sektor potensi jasa lingkungan, program penanaman mangrove kemudian juga dibuat sekalian dengan tawaran paket ekowisata.²⁴ Dari sektor ekonomi alternatif, terbangun usaha seperti jasa porter/asisten penelitian. NGO Yayasan Palung mempekerjakan mereka sebagai porter untuk peneliti-peneliti kulit putih di SPCP. Berdasarkan laporan NGO ASRI tentang *Kawasan Hijau* di Tanjung Gunung, ada perubahan status rawan deforestasi menjadi ramah. Pada akhirnya, JICA mengklaim adanya penurunan secara drastis jumlah pembalok liar di Tanjung Gunung dalam kurun waktu 2013 hingga 2017, setidaknya 75 mantan pembalok telah mendukung konservasi taman nasional.

kuasa dari dalam; Lihat juga konsep “affective states” dari Stoler (2007).

- 22 Harkat intrinsik Denny adalah kapasitas suatu amalan untuk beroperasi pada ruang sosial formal atau informal, kapasitas yang menyerupai konsepsi Riles (2002) mengenai “sociality of expertise”.
- 23 Tenaga kerja yang tercurah di Tanjung Gunung juga dapat dikategorikan dengan apa yang disebut Smith (1999, 173-174) sebagai “bidang fleksibilitas” (*theory of flexibility*).
- 24 Lihat Pahlevi (2015) “Para Pembalok Itu Kini Penanam Mangrove”.

Sesuai pendapat Li (2007a, 233) bahwa proyek pengorganisasian adalah bidang moral yang mengikat orang-orang ke dalam hubungan yang tahan lama sesuai dengan nilai panutannya. Praktik pemberdayaan atau mencari peluang ekonomi baru yang diamalkan fasilitator IJ-REDD+ sebagai kuasa amal bijak menunjukkan unsur *governmentality* dengan jelas. Problematisasinya yang beda dengan pengentasan kemiskinan,²⁵ membuat kuasa amal bijak tidak muncul dalam ruang tabula rasa. Kuasa amal bijak diwariskan dan dipertahankan.

Pemosisian Diri

Negara harus menyisihkan atau memangkas penghalang paling signifikan yaitu lingkaran setan pembalakan liar untuk (1) tujuan ideologi hutan konservasi, dan (2) pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat dan daerah tanpa pengaruh jaringan penebangan (lihat McCarthy 2000; 2002b). Masyarakat yang terlibat jaringan itu memahami maksud peralihan sumber penghidupan, dan hanya akan ada sedikit insentif dalam waktu pendek bagi mereka yang terlibat. Tugas Denny adalah memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa penebangan liar sudah tidak layak secara ekonomi. Sementara, tugas Harman adalah mendukung konservasi TNGP.

Titik perubahan posisi Harman sesungguhnya berhubungan dengan apa yang dia maksud sebagai perbaikan hidup. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, orang Tanjung Gunung secara berulang, terus mengalami titik peralihan penting akses terhadap sumber daya *frontier*. Hal ini menyebabkan individu harus menempatkan dan menyesuaikan diri. Pemosisian Harman adalah bagian dari janji yang ingin dia kuasai, ingin dia amalkan secara berulang. Oleh sebab itu, Harman harus menghindari dari posisi yang kontradiktif antara janji perbaikan hidup dengan kemelut pembalakan liar. Amalan Harman hendaklah sebuah amal kebajikan.

Seorang bos penggesek seperti Harman sesungguhnya takut masuk bui, khawatir gagal dalam bertanggung jawab menghidupi anak buahnya. Sedangkan orang Tanjung Gunung mengukur nasibnya berdasarkan kemampuan membeli sembako, kecanggihan teknologi, gaya hidup, dan alat transportasi. Hal yang kemudian membedakan nasib mereka dengan Harman adalah praktik hidup dan mencari/mengumpulkan rejeki atau keberuntungan. Orang Bugis menggunakan istilah *massapa dalle*’ atau ‘mencari rejeki’ untuk menggambarkan perbedaan nasib itu. Ide ini mendasarkan perbedaan individu dari caranya merebut dan memperjuangkan nasib atau rejeki dunia (lihat Acciaioli 1989; Tsing 1993; Li 2014). Saya melihat, misalnya, Harman membiarkan anaknya untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang jelas, dia enggan jika anaknya nanti merasakan penderitaan yang pernah Harman rasakan. Sebab, belum tentu anaknya nanti mampu bertahan menghadapinya.

Kompetisi “saling mengintai” di hutan, seperti telah Harman sebutkan di atas, memiliki korelasi dengan sistem klientelisme. Benar bahwa usahanya dipandu oleh prinsip *dalle*’, namun Harman memerlukan kekuatan yang lebih dari sekedar usaha

25 Kajian Zerner, Tsing, Brosius, dan Zerner (2005) mengatakan paket program CBNRM tidak bertujuan untuk pengentasan kemiskinan sebagai satu-satunya hal yang harus diatasi. Kemiskinan adalah satu isu di antara isu-isu lain seperti migrasi ke kawasan hutan atau ketidakamanan tenurial (lihat Fairhead dan Leach, 1996).

pribadinya. Bentuk praktik pertukaran kerja yang bersifat hubungan tolong-menolong telah mempermudah unsur dukungan dari klien. Misalnya dengan Harman menanggung santunan kecelakaan kerja. Biaya semacam ini di luar dari kontrak sistem tauke. Tetapi santunan merupakan wujud tanggung jawab atas nasib para penggesek. Dan sebagai ganti, Harman meminta kejujuran dan loyalitas mereka.

Penutupan akses oleh Balai TNGP, lalu kebijakan yang tak mengganti pekerjaan lama menimbulkan sikap antipati dan kekecewaan. Harman kerap menantang petugas balai:

”Seandainya kau ada di posisi saya. Jangan cuma melarang, menegakkan, kasih lah solusi! Carikan kita lapangan kerja, siapkan. Bangun pabrik di sini, kita sebagai buruh saja. Yang penting kita kerja dan ada sesuatu untuk kita makan.” (Wawancara dengan Harman, 19 Maret 2018)

Pemikiran Harman tersebut menunjukkan, ketika cara hidupnya yang lama menjadi tidak mungkin, maka yang baru harusnya menggantikan. Acciaoli (1989) telah memberi contoh dari orang Bugis, bahwa *massapa dalle'* membutuhkan sikap khusus dan pendekatan tertentu yang menekankan penerimaan. Cara penempatan diri ini, seperti Li katakan adalah “a matter of subtle adjustment” (2014, 81).

Penempatan diri Harman memprovokasi praktik politik dengan merangkul buruh penggesek ikut ke dalam program konservasi. Kegigihan dan kemandirian membuat Harman berusaha bertanggung jawab dan bertekad membuat aliran sumber rejeki yang baru. Tujuan Harman adalah menjauhkan kemalangan bagi mereka yang tidak lagi menggantungkan rejeki dari usaha kayu. Praktik semacam ini menempatkan Harman kembali menjadi patron. Harman membuktikan bahwa hasil usaha kayunya dulu masih menyisakan modal untuk bertahan sampai dia keluar penjara. Bahkan menurut orang Tanjung Gunung modalnya tidak hilang sama sekali.

Menjadi sosok patron berarti menjadi penguasa atas nasibnya sendiri, dan penopang rejeki orang-orang disekitarnya. Usaha keras tidak akan menuai kegagalan sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Harman berencana ingin kembali bekerja sebagai pengusaha kayu, tetapi dari kayu yang dia tanam sendiri, bukan dari hasil membalak. Harman punya kehendak kuat untuk memimpin kelompok nelayan, kelompok tani jabon, mereboisasi hutan bakau, dan mengembangkan pertanian organik.

“Kalau kerja ini ndak bisa memberi hasil yasudah, berarti belum rejeki. Tapi kita jangan langsung mundur. ... Makanya sekarang, pekerjaan saya banyak macamnya, supaya saya ibaratkan itu mereka anak buah dapat manfaat, sedikit-sedikit tapi jadi banyak. Itulah perputaran ekonomi.” (Wawancara dengan Harman, 19 Maret 2018)

Anak buah Harman semuanya terlibat dalam program perbaikan yang dia pimpin. Kapital Harman telah bermetamorfosis,²⁶ dan terkoneksi dengan bidang pemberdayaan, bidang jaringan pengaman, sekaligus di bidang kemandirian ekonomi, bidang *dalle'*.

Selain penguasaan modal yang Harman bisa ubah bentuknya dalam wujud penguasaan tenaga kerja, modal Harman sangat bergantung dengan kuasa amal bijak atau

26 Diskusi mengenai konsep “metamorfosis kapital” lihat tulisan Mitchell (2002, 27-31).

kapasitas yang *dispositif*. Keberadaan *dispositif* telah memungkinkan wali masyarakat, Denny, atau seorang ahli menegaskan batasan-batasan dalam relasi kekuasaan atau dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan subjek. Denny memosisikan diri sebagai fasilitator, penyedia solusi. Pemosisian Denny juga berdampak pada upaya untuk menghindari dari posisi kontradiktif. Dan dia memilih Harman sebagai rekan untuk memobilisasi perubahan, alih-alih memilih bekerja dengan rekan staf balai.

Pertemanan atau konsensus hanyalah instrumen lain dalam diri Denny sepeeninggal instrumen koersif. Wujud tindakan rekursif dalam operasi kekuasaan mengubah sifat instrumen-instrumen dalam diri Denny (teknologi diri). Kedua instrumen melekat sebagai kapasitas otonom individu, sebagai sentimen yang memiliki sejarah, tetapi bisa dimodifikasi sendiri. Dengan mengubah pola pikir, Denny menciptakan ranah kemungkinan pilihan tindakan pada hubungan-hubungan pertemanan, komitmen perubahan, komunikasi fatis, solusi, perbaikan hidup, dan beberapa lainnya. Secara empiris, arena intervensi program IJ-REDD+ telah dikonstruksi di Tanjung Gunung. Denny menghendaki kuasa amal bijaknya dengan menghadirkan pilihan-pilihan terbuka namun terbatas pada kebijakan taman nasional. Denny sedang tidak memengaruhi Harman, tetapi ia menghadirkan ranah pilihan tindakan kepada masyarakat; dan Harman memilih menjalankan kuasa amal bijak yang sebenarnya dikehendaki taman nasional *vis a vis* JICA.

Kuasa amal bijak Harman adalah transformasi *dalle'* menjadi semboyan besar untuk menyejahterakan perekonomian dirinya dan masyarakat yang diampu. Amalan itu tidak ditutupi, amalan itu mengandung muatan nilai-nilai yang serupa dengan muatan amalan Denny sebagai wali masyarakat. Amalan ini menyiarkan, menempa, mentransmisi subjek di arena *frontier*, di arena kosmopolitan itu. Konstruksi marjinalitas pun mengalami keterbatasan. Konstelasi posisi Harman menyempal dari sifat keterpinggirannya, dianugerahi sifat jejaring yang ia maknai di dalam dan di luar relasi negara, sehingga konstelasi yang mengekannya malah memberikan Harman keleluasaan untuk mengamalkan intervensi. Relasi kekuasaan memberikan secara leluasa kemungkinan pilihan tindakan sekaligus cara-cara menggunakan pilihan tersebut sebagai suatu amalan sesuai kehendak untuk memperbaiki kehidupan. Kuasa amal bijak mendemonstrasikan praktik tersituasi yang ingin memotret sirkulasi ekonomi yang sah, matang, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Artikel ini telah membahas, bahwa dalam kuasa amal bijak, orang-orang yang tertarik mengikuti jalannya program atau mendukung program konservasi taman nasional memiliki karakter mandiri dengan kepemimpinan tinggi. Mereka mereproduksi diri mereka sendiri sambil bergantung pada dukungan TNGP, yang dianggapnya sebagai patron atau penyedia solusi terhadap kehilangan mata pencaharian. Penulis telah mendeskripsikan praktik politik yang membuat subjek seperti Harman, atau aktor pebisnis lokal yang mampu memobilisasi tenaga kerja dan berjejaring dengan pejabat kabupaten atau kelompok klien, berubah menjadi konservasionis.

Dalam artikel ini, beberapa hal telah didemonstrasikan untuk mengupas relasi kekuasaan yang bekerja di balik perubahan posisi aktor dengan memanfaatkan ranah

kemungkinan pilihan tindakan subjek. Saya mendemonstrasikan juga posisi Harman yang melibatkan seluk-beluk sosiokultural wacana, praktik, dan politik orang Tanjung Gunung dalam wujud praktik yang disebut *dalle*. Praktik perbaikan hidup ini mendasarkan amalan bijak yang baik untuk mereka sendiri, untuk kelompoknya. Penulis mendemonstrasikan proses rekognisi JICA yang menganjurkan teknik pendekatan *Arumono Saghasi* pada proses intervensi yang rasional *cum* kultural. Dalam praktiknya, rasionalisasi pendekatan itu mengundang sejumlah keterbatasan. Dengan mengandalkan pengaruh kuasa amal bijak, wali masyarakat mengejawantahkan kekuasaan yang mendukung arah perjuangannya sendiri. Kuasa ini menggunakan pendekatan fatis untuk menembus sekat-sekat perbedaan budaya, meringankan komunikasi intersubjektif dalam pelaksanaan program, bahkan “menantang” sistem keproyekan.

Penulis telah berargumen bahwa program IJ-REDD+ di Tanjung Gunung dengan konjungtur disjungtif pertemanan Denny dan Harman adalah contoh kasus primer yang menggambarkan beroperasinya *governmentality*, eksekusi dari kekuasaan pemerintahan, dan kuasa perbaikan dalam perspektif *the will to improve*. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan selalu tersebar dan terintegrasi dalam setiap relasi sosial yang khas. Kuasa amal bijak menjadi cermin dari praktik politik yang bersifat saling menguntungkan, kolektif, sosial, dan afektif.

Referensi

- Acciaioli, Greg. 1989. “Searching for Good Fortune: The Making of Bugis Shore Community at Lake Lindu, Central Sulawesi.” Disertasi, Australian National University.
- Agrawal, Arun. 2005. *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*. Durham: Duke University Press.
- Barth, J. P. J. 1895. *Overzicht Der Afdeeling Soekadana*. Batavia: Albrecht & Co.
- Blanchard, Libby, Chris G. Sandbrook, Janet A. Fisher, dan Bhaskar Vira. 2017. “Investigating the Consistency of a Pro market Perspective Amongst Conservationists.” In *The Anthropology of Conservation NGOs: Rethinking the Boundaries*, edited by Peter B. Larsen dan Dan Brockington, 151-180. London: Palgrave Macmillan.
- Boomgaard, Peter. 1999. “Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949.” *Environment and History* 5 (3): 257-292.
- Brockington, Dan, dan Jim Igoe. 2006. “Eviction for Conservation: A Global Overview.” *Conservation and Society* 4 (3): 424-470.
- Brosius, Peter. 2004. “Indigenous Peoples and Protected Areas at the World Parks Congress.” *Conservation Biology* 18 (3): 609-612.
- Carrier, James dan Paige West. 2009. “Introduction.” In *Virtualism, Governance and Practice: Vision and Execution in Environmental Conservation*, edited by James G. Carrier dan Paige West, 1-23. New York dan Oxford: Berghahn Books.
- Casson, Anne dan Krystof Obidzinski. 2002. “From New Order to Regional Autonomy: Shifting Dynamics of “Illegal” Logging in Kalimantan, Indonesia.” *World Development* 30 (12): 2133-2151.
- Cepek, Michael. 2008. “Essential Commitments: Identity and the Politics of Cofa n Conservation.” *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology* 13 (1): 196-

222.

- Cepek, Michael. 2011. "Foucault in the forest: Questioning environmentalism in Amazonia." *American Ethnologist* 38 (3): 501-515.
- Cepek, Michael. 2012. "Strange Powers Conservation, Science, and Transparency in an Indigenous Political Project." *Anthropology Today* (28): 14-17.
- von Dewall, Hermann. 1862. "Matan, Simpang, Soekadana, de Karimata-eilanden en Koeboe (Wester-afdeeling van Borneo)." In *Tijdschrift voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, edited by Jacob Anne van der Chijs, 1-146. Batavia: Lange & Co.
- Dowie, Mark. 2006. "Conservation refugees: When protecting nature means kicking people out." *Grain*, 25 Januari, 2006. <https://www.grain.org/en/article/545-conservation-refugees-when-conservation-means-kicking-people-out>.
- Dzingirai, Vupenyu. 2003. "The New Scramble for the African Countryside." *Development and Change* 34 (2): 243-263.
- Elyachar, Julia. 2010. "Phatic labor, infrastructure, and the question of empowerment in Cairo." *American Ethnologist* 37 (3): 452-464.
- Endi, Severianus. 2015. "Repressive approach "ineffective" in conservation efforts Official." *The Jakarta Post*, 2 Juni, 2015. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/06/02/repressive-approach-ineffective-conservation-efforts-official.html>.
- Escobar, Arturo. 2007. "Identity." In *A Companion to the Anthropology of Politics*, edited by David Nugent dan Joan Vincent, 248-266. Oxford: Blackwell.
- Fairhead, James dan Melissa Leach. 1996. *Reframing Deforestation: Global analyses and local realities: studies in West Africa*. London dan New York: Routledge.
- Ferguson, James. 1994. "The Anti-Politics Machine: "Development" and Bureaucratic Power in Lesotho." *The Ecologist* 24 (5): 176-181.
- Fernando, M. R. dan David Bulbeck, ed. 1992. *Chinese Economic Activity in Netherlands India: Selected Translations from The Dutch*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Gie, Phoa Liong. 1992. "The Changing Economic Position of the Chinese in Netherlands India." In *Chinese Economic Activity in Netherlands India: Selected Translations from The Dutch*, edited by M. R. Fernando dan David Bulbeck, 5-18. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Gumelar, Dhimas Langgeng. 2020. "Memperbaiki Pengelolaan Konservasi: Praktik Pemerintahan di Balai Taman Nasional Gunung Palung Kalimantan Barat." Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, Herman. 2016. *Forest Resources Management in Indonesia (1968-2004): A Political Ecology Approach*. Singapura: Springer.
- Hiller, Marc, Benjamin C. Jarvis, Hikma Lisa, Laura J. Paulson, Edward H. B. Pollard, dan Scott A. Stanley. 2004. "Recent Trends in Illegal Logging and a Brief Discussion of Their Causes." *Journal of Sustainable Forestry* 19 (1-3): 181-212.
- Igoe, Jim, Dan Brockington, dan Rosaleen Duffy 2008. *Nature Unbound: Conservation, Capitalism and the Future of Protected Areas*. London: Earthscan.
- de Jong, Edwin, Luuk Knippenberg, dan Laurens Bakker. 2017. "New frontiers: an enriched

- perspective on extraction frontiers in Indonesia.” *Critical Asian Studies* 49 (3): 330-348.
- Kubo, Hideyuki, Ari Wibawanto, dan Dicko Rossanda. 2019. “Toward a policy mix in conservation governance: A case of Gunung Palung National Park, West Kalimantan, Indonesia.” *Land Use Policy* 88: 1-11.
- Lash, Scott. 2007. “Power after Hegemony; Cultural Studies in Mutation?” *Theory, Culture and Society* 24 (3): 55-78.
- Leach, Melissa dan James Fairhead. 2000. “Fashioned Forest Pasts, Occluded Histories? International Environmental Analysis in West African Locales.” *Development and Change* 31 (1): 35-59.
- Li, Tania. 2000. “Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot.” *Comparative Studies in Society and History* 42 (1): 149-179.
- Li, Tania. 2007a. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press.
- Li, Tania. 2007b. “Practices of assemblage and community forest management.” *Economy and Society* 36 (2): 263-293.
- Li, Tania. 2007c. “Governmentality.” *Anthropologica* 49 (2): 275-281.
- Li, Tania. 2008. “Social reproduction, situated politics, and The Will to Improve.” *Focaal* 52: 111-118.
- Li, Tania. 2010. “Revisiting The Will to Improve.” *Annals of the Association of American Geographers* 100 (1): 233-235.
- Li, Tania. 2014. *Land's Ends: Capitalist Relations on Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Li, Tania. 2015. “Governing rural Indonesia: convergence on the project system.” *Critical Policy Studies* 10 (1): 79-94.
- Lindblad, J. Thomas. 1994. “The Contribution of Foreign Trade to Colonial State Formation in Indonesia, 1900-1930.” In *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880-1942*, edited by Robert Cribb. Leiden: KITLV Press.
- Lineton, Jacqueline Andrew. 1975. “An Indonesian Society and its Universe: A Study of the Bugis of South Sulawesi (Celebes) and Their Role within a Wider Social and Economic System.” Disertasi. University of London.
- Lowe, Celia. 2006. *Wild Profusion: Biodiversity Conservation in an Indonesian Archipelago*. New Jersey: Princeton University Press.
- Mansyur, Mansyur. 2016. “Migrasi Dan Jaringan Ekonomi Suku Bugis Di Wilayah Tanah Bumbu, Keresidenan Borneo Bagian Selatan Dan Timur, 1930-1942.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 1 (1): 24-39.
- McCarthy, John. 2000. “‘Wild Logging’: The Rise and Fall of Logging Networks and Biodiversity Conservation Projects on Sumatra’s Rainforest Frontier.” *Occasional Paper No. 31, Oktober*. Bogor: CIFOR.
- McCarthy, John. 2002a. “Power and Interest on Sumatra’s Rainforest Frontier: Clientelist Coalitions, Illegal Logging and Conservation in the Alas Valley.” *Journal of Southeast Asian Studies* 33 (1): 77-106.
- McCarthy, John. 2002b. “Turning in Circles: District Governance, Illegal Logging, and Environmental Decline in Sumatra, Indonesia.” *Society and Natural Resources* 15

- (10): 867-886.
- Mitchell, Timothy. 2002. *Rule of Experts: Egypt, Technopolitics, Modernity*. Berkeley: University of California Press.
- Moeliono, Moira, Godwin Limberg, Pam Minnigh, Agus Mulyana, Yayan Indriatmoko, Nugroho Adi Utomo, Saparuddin, Hamzah, Ramses Iwan dan Edy Purwanto. 2010. *Meretas kebuntuan Konsep dan panduan pengembangan zona khusus bagi Taman Nasional di Indonesia*. Bogor: CIFOR.
- Mosse, David. 2004. *Cultivating Development: An Ethnography of Aid Policy and Practice*. London: Pluto Press.
- Mosse, David. 2008. "International policy, development expertise, and anthropology." *Focaal* (52): 119-126.
- Newberry, Jan. 2018. "A Kampung Corner: Infrastructure, Affect, Informality." *Indonesia* 105: 191-206.
- Orlove, Benjamin dan Setephen Brush. 1996. "Anthropology and the Conservation of Biodiversity." *Annual Review of Anthropology* 25: 329-352.
- Ota, Atsushi. 2010. "Pirates or Entrepreneurs?" The Migration and Trade of Sea People in Southwest Kalimantan, c. 1770-1820." *Indonesia* 90: 67-95.
- Pahlevi, Aseanty. 2015, "Para Pembalok Itu Kini Penanam Mangrove." *Mongabay*, 26 Juli, 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/07/26/para-pembalok-itu-kini-penanam-mangrove/>.
- Panagia, Davide. 2019. "On the Political Ontology of the Dispositif." *Journal Critical Inquiry* 45 (3): 714-746.
- Peluso, Nancy Lee. 1992. *Rich Forests, Poor People Resource Control and Resistance in Java*. California: University of California Press.
- Peluso, Nancy Lee dan Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand." *The Journal of Asian Studies* 60 (3): 761-812.
- Potter, Lesley. 2005. "Commodifying, consuming and converting Kalimantan's forests, 1950-2002." In *Muddied Waters: Historical and Contemporary Perspectives on Management of Forests and Fisheries in Island Southeast Asia*, edited by Peter Boomgaard, David Henley, dan Manon Osseweijer, 373-399. Leiden: KITLV.
- Rijksen, Herman dan Erik Meijaard, E. 1999. *Our vanishing relative: The status of wild orang-utans at the close of the twentieth century*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Riles, Annelise. 2002. "User Friendly: Informality and Expertise." *Law & Social Inquiry* 27 (3): 613-619.
- Salafsky, Nick, Barbara L. Dugelby dan John W. Terborgh. 1993. "Can Extractive Reserves Save the Rain Forest? An Ecological and Socioeconomic Comparison of Nontimber Forest Product Extraction Systems in Petén, Guatemala, and West Kalimantan, Indonesia." *Conservation Biology* 7 (1): 39-52.
- Smith, Gavin. 1999. *Confronting the Present: Towards a Politically Engaged Anthropology*. Oxford dan New York: Berg.
- Soetarto, Endriatmo, Felix Sitorus, dan Yusup Napiri. 2001. *Decentralisation of Administration, Policy Making and Forest Management in Ketapang District*. Bogor: CIFOR.

- Stoler, Ann Laura. 2007. "Affective States." In *A Companion to the Anthropology of Politics*, edited by David Nugent dan Joan Vincent, 4-20. Oxford: Blackwell Publishing.
- Tempo. 2008. "Asyiknya Menjarah Rame-Rame." *Tempo*, 14 April, 2008. <https://majalah.tempo.co/read/opini/126901/asyiknya-menjarah-rame-rame>
- Tsing, Anna. 1993. *In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place*. Princeton: Princeton University Press.
- Tsing, Anna. 2003. "Natural Resources and Capitalist Frontiers." *Economic and Political Weekly* 38 (48): 5100- 5106.
- Tsing, Anna. 2012. "Contaminated Diversity in 'Slow Disturbance': Potential Collaborators for a Liveable Earth." In *Why Do We Value Diversity? Biocultural Diversity in a Global Context*, edited by Gary Martin, Diana Mincyte, dan Ursula Münster, 95-97. München: RCC Perspectives.
- Tsing, Anna, Peter J. Brosius, dan Charles Zerner, C. 2005. "Introduction: Raising Questions about Communities and Conservation." In *Communities and Conservation: Histories and Politics of Community-Based Natural Resources Management*, edited by oleh Anna Tsing, Peter J. Brosius dan Charles Zerner, 1-36. Lanham: Altamira Press.
- Welker, Marina. 2012. "The Green Revolution's ghost: Unruly subjects of participatory development in rural Indonesia." *American Ethnologist* 39 (2): 389-406.
- Wenk, Iriana. 2012. "Ancestral domain: land titling and the conjuncture of government, rights and territory in central Mindanao." Disertasi. Faculty of Arts, University of Zurich.
- West, Paige. 2006. *Conservation Is Our Government Now: The Politics of Ecology in Papua New Guinea*. Durham dan London: Duke University Press.
- West, Paige, James Igoe, dan Dan Brockington. 2006. "Parks and Peoples: The Social Impact of Protected Areas." *Annual Review of Anthropology* 35: 251-277.
- Yoshikura, Toshihide. 2017. "Toward development of desirable REDD-plus implementation system: how sustainable forest management can be achieved by dealing with socio-economic diversity in local communities." Disertasi. Sekolah Pascasarjana Ilmu Humaniora, Waseda University.